

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suud, 2006).

2.1.1 Kesejahteraan Sosial Sebagai Suatu Keadaan

Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Itu adalah, pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan terakhir, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat. (Suud, 2006)

2.1.2 Kesejahteraan Sosial Sebagai Suatu Kegiatan Atau Pelayanan.

Kesejahteraan sosial mencakup pelayanan-pelayanan sosial yang terdapat di masyarakat sebagai upaya atau tindakan dalam membantu mengatasi permasalahan-permasalahan agar terjalin sebuah keberfungsian sosial (*social functioning*) seseorang baik secara individu maupun kelompok.

“Is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”. (Friedlander,1962)

Suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan; serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat. (Friedlander,1962)

2.1.3 Kesejahteraan Sosial Sebagai Ilmu

Ilmu Kesejahteraan sosial merupakan pengetahuan sistematis yang membahas isu kesejahteraan dan upaya-upaya mencapai kesejahteraan. Kemunculan disiplin ini merupakan hasil dari perluasan pokok bahasan bidang pekerjaan sosial. Kesejahteraan sosial adalah Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang. (Rukminto, 2005).

2.2 Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Praktik Pekerjaan Sosial adalah proses pertolongan profesional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat. Pincus dan Minahan (1976) Mengemukakan:

“Pekerjaan sosial sebagai profesi yang bertugas menyelenggarakan serta membantu manusia menggunakan program-program/pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial. Pekerjaan Sosial adalah suatu bidang yang melibatkan interaksi-interaksi diantara orang dengan lingkungan sosialnya, yang mempergunakan kemampuan orang untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya mengatasi penderitaan, dan mewujudkan aspirasi-aspirasi serta nilai-nilai mereka”. (Pincus dan Minahan 1976)

Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional. Kegiatan tersebut berlandaskan kepada ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai ilmiah. Kegiatan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pekerjaan sosial adalah kegiatan pertolongan. Orientasi pertolongan pekerjaan sosial dipusatkan kepada kepentingan orang-orang yang ditolong (klien), untuk kepentingan pemecahan masalah klien bukan kepentingan pekerja sosial.

Tujuan pekerjaan sosial menurut Dean H. Hepworth & Jo Ann Larsen adalah *The purpose of social work is to promote or restore a mutually benefit interaction between individuals and society in order to improve the quality of life for everyone.*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan untuk meningkatkan atau memulihkan interaksi secara timbal balik antara individu dengan masyarakat merupakan tujuan yang hendak dicapai, agar tercipta kehidupan yang berkualitas

tinggi. Pekerja sosial didalam mencapai tujuan di atas harus mempunyai keyakinan bahwa:

1. Lingkungan (lingkungan fisik, sosial dan organisasi) hendaknya:
 - a) Memberikan kesempatan dan sumber-sumber agar setiap individu dapat merealisasikan segenap potensi dan aspirasinya secara maksimal.
 - b) Memberikan kesempatan dan sumber-sumber guna memenuhi kebutuhan semua manusia dan untuk mengurangi tekanan dan penderitaan yang dialami.
2. Individu-individu hendaknya memberikan kontribusi atau sumbangan yang efektif, sehingga dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada orang lain di lingkungan terdekat sampai pada masyarakat luas.
3. Transaksi individu dengan individu lain didalam masyarakat hendaknya dapat meningkatkan pengakuan bahwa setiap manusia mempunyai harkat dan martabat, individu yang unik, menentukan diri sendiri

Lebih lanjut memperinci tujuan pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Membantu orang memperluas kompetensinya dan meningkatkan kemampuan mereka menghadapi serta memecahkan masalah.
 2. Membantu orang memperoleh sumber – sumber
- Banyak orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang sistem sumber yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pekerja sosial

berperan sebagai broker (perantara) mengkaitkan orang dengan sistem sumber yang ada seperti pelayanan kesejahteraan anak, kesehatan, kesehatan mental dan sebagainya.

3. Membuat organisasi-organisasi yang responsif dalam memberikan pelayanan kepada orang.
4. Memberikan fasilitas interaksi antar individu dengan individu lain didalam lingkungan mereka. Kualitas hidup seseorang ditentukan oleh kualitas interaksinya dengan orang lain di lingkungan sosialnya.
5. Mempengaruhi interaksi antara organisasi-organisasi dengan institusi-institusi
6. Mempengaruhi kebijakan sosial maupun kebijakan lingkungan.

2.2.2 Pengertian Intervensi dalam Pekerjaan Sosial

Secara etimologi, Intervensi berasal dari kata atau bahasa Inggris yakni *Intervention*, kata ini artinya campur tangan atau pelibatan seseorang atau lembaga/negara dalam masalah seseorang, kelompok dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan cara dan strategi tertentu. Sedangkan kata intervensi pada dimensi sosial yaitu bentuk keterlibatan atau campur tangan antara dua belah pihak dalam proses penyelesaian atau penuntasan masalah sosial yang dihadapinya, di mana dilakukan secara terencana dan prosedural. Berkaitan hal ini Intervensi dapat juga dipahami sebagai tindakan spesifik oleh seorang pekerja sosial dalam rangka mendorong ataupun merancang perubahan sosial agar tercipta keberfungsian sosial pada kliennya. (DR. Iskandar, 2019)

Menurut DuBois & Miley (2014) bahwa, intervensi di level makro dalam pekerjaan sosial meliputi kegiatan pada lingkungan, komunitas dan masyarakat untuk menciptakan perubahan sosial di dalamnya. Di Indonesia menurut Adi (2008) bahwa terminologi komunitas umumnya dihadirkan dalam pembahasan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Dengan demikian, secara konseptual menurut Rukminto Adi, bahwa kata kerja dari intervensi makro adalah intervensi komunitas, di mana pengertian komunitas juga dapat mengacu pada pengertian komunitas dalam arti komunitas lokal, seperti apa yang dikemukakan oleh Kenneth Wilkinson (1991) dalam Green dan Haines (2002:4) dan dalam Rukminto Adi (2008:117).

Tiga model dalam menjawab persoalan yang muncul pada isu pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, ketiga model intervensi tersebut yakni:

1. Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*)

Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*) adalah arah pengembangan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

2. Perencanaan Dan Kebijakan Sosial (*Social Planning/Policy*)

Perencanaan Dan Kebijakan Sosial (*Social Planning/Policy*) adalah proses pembuatan kebijakan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

3. Gerakan Sosial Atau Aksi Sosial (*Sosial Action*),

Gerakan Sosial atau Aksi Sosial (*Sosial Action*) adalah Model lebih ke aksi-aksi pembelaan masyarakat yang termarginalkan dan diperlakukan secara tidak adil oleh Pembangunan.

2.3 Pemberdayaan Perempuan

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai dari marginalisasi, makhluk Tuhan nomor dua, separuh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan bahkan sering diperlakukan dengan kasar atau setengah budak. Seakan memposisikan perempuan sebagai kelompok masyarakat kelas dua, yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi di Indonesia dalam bidang pendidikan relatif masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit jumlah perempuan yang mengesalnya.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi Pemberdayaan juga merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Untuk nantinya mencapai keberfungsian sosial. (Parsons 1994)

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Priyono dan Pranaka, 1996).

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. menurut (Ambar T. Sulistyani 2004).

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui sebuah proses, melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan di atas. Tujuan pemberdayaan perempuan menurut Sumodiningrat yaitu sebagai berikut :

1. Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu

berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.

2. Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki.
3. Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

2.3.3 Tahapan Pemberdayaan Perempuan.

Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat Tahap Penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat merangsang

kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

1. Tahap Transformasi

Kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

2. Tahap Peningkatan Kemampuan .

Intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat

melakukan tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. (Ambar T. Sulistyani,2004)

2.4 Keberfungsian Sosial

2.4.1 Pengertian Keberfungsian sosial

Keberfungsian sosial merupakan suatu cara yang menggambarkan perilaku orang. Cara atau perilaku tersebut dilakukan oleh individu, keluarga, organisasi maupun masyarakat. Dalam konteks yang demikian, kelompok perempuan rentan merupakan orang yang mengalami masalah dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Siporin (1975)

Konsep keberfungsian sosial mencakup empat tingkatan, yakni tingkatan individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Bila perempuan rentan dipandang sebagai individu yang mengalami masalah dalam interaksi sosialnya, maka karakteristik keberfungsian sosialnya akan berkisar pada masalah:

- a. Kemampuan dalam melaksanakan peranan sosial dalam kehidupan.
- b. Kemampuan menjalin relasi positif dengan orang lain.
- c. Kemampuan dalam menghargai diri sendiri.

2.5 *Non Government Organization (NGO)*

2.5.1 Pengertian *Non Government Organization (NGO)*

Non Government Organization (NGO) merupakan suatu lembaga, kelompok, atau organisasi yang aktif dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan terutama pada lapisan masyarakat bawah. Dalam mencari istilah Indonesia bagi NGO, ditemukan istilah yang sering dipakai oleh

Kementerian Kerjasama International Jerman (Barat) yaitu *Self Help Promoting Institute* (SHPI) dan *Self Help Organization* (SHO), masing-masing dimaksudkan sebagai lembaga yang didirikan dengan tujuan menolong yang lain, sedang yang kedua dimaksudkan untuk menolong diri sendiri. (Nugroho,2001)

2.5.2 Peran dan Kategori *Non Government Organization* (NGO)

NGO dapat memainkan beberapa peranan dalam mendukung kelompok swadaya yang dikembangkan, termasuk di antaranya adalah:

1. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik-taktik untuk memenuhi kebutuhan;
2. Melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut;
3. Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran-sasaran pembangunan lebih umum;
4. Menghasilkan dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan.

Peraturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Tiap NGO biasanya tidak menjalankan semua fungsi ini, setidaknya pada waktu yang sama. NGO di Indonesia dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor non-profit. Ia melakukan teoritisasi terhadap fenomena NGO dengan mencirikan organisasi sektor non profit tersebut sebagai berikut :

1. Terorganisir (*organized*); terinstitusionalisasi dari sudut bentuk organisasi dan sistem operasinya

2. Bukan negara (private); secara institusional bukan bagian dari negara atau pemerintah
3. Tidak berorientasi profit (non-profit distributing); tidak berorientasi menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau para direktornya, tetapi mengembalikan pendapatannya untuk kepentingan misinya.
(Morris,2000)

2.6 Zakat

2.6.1 Pengertian Zakat

Zakat (bahasa Arab: زكاة, translit. zakāh) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. (Dr. Oni Sahroni, Lc., 2018)

2.6.2 Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok tiang penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. (Dr. Oni Sahroni, Lc., 2018)

2.6.3 Jenis Zakat

1. Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7

kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. (Dr. Oni Sahroni, Lc., 2018)

2. Zakat Maal (Harta)

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mengacu kepada harta yang dimiliki. Zakat maal pada zaman sekarang meliputi ,akat Penghasilan/Profesi, Zakat Emas dan Perak juga Zakat Niaga, peternakan, perkebunan. (Dr. Oni Sahroni, Lc., 2018)

2.6.4 Kuadaran *Center for Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST)

Permasalahan kemiskinan tentu sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial. Dr Irfan Syauqi Beik mengungkapkan bahwa terdapat model yang dapat mengukur kemiskinan dan kesejahteraan dari perspektif ekonomi syariah. Konsep ini dikenal dengan Model Cibest. Model Cibest merupakan singkatan dari *Center for Islamic Business and Economic Studies* merupakan suatu model pengukuran kemiskinan dengan menggunakan indikator pemenuhan kebutuhan spiritual dan material. Cibest menjadi model pengukuran kemiskinan yang berbeda dengan model pengukuran kemiskinan lainnya karena model Cibest ini dianggap lebih cocok untuk mengukur kemiskinan di negara-negara yang penduduknya bermayoritas muslim.

Dalam model Cibest terdapat dua komponen utama, yaitu tipologi kemiskinan dan indeks. Tipologi kemiskinan ini didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an. Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual menjadi dua tanda, yaitu tanda positif (+) yang

berarti rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhan dengan baik, dan tanda negatif (-) artinya rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Di mana sumbu X merupakan garis material dan sumbu Y merupakan garis spiritual.



Gambar 2.1 Kuadran CIBEST

Berdasarkan Gambar di atas, model Cibest dibagi menjadi empat kuadran. Kuadran material ditunjukkan dengan sumbu horizontal, sedangkan kebutuhan spiritual ditunjukkan dengan sumbu vertikal. Tanda (+) pada sumbu horizontal menunjukkan bahwa kebutuhan material oleh suatu rumah tangga telah terpenuhi sedangkan tanda (-) menunjukkan bahwa kebutuhan material suatu rumah tangga kekurangan kebutuhan material. Pada tanda (+) pada sumbu vertikal menunjukkan bahwa kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya sedangkan tanda (-) menunjukkan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Model CIBEST adalah model perhitungan kemiskinan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Yang menjadi isu pokok dalam model ini adalah, bagaimana menetapkan standar kebutuhan material dan kebutuhan spiritual ini, sehingga memudahkan kita dalam

menganalisis apakah suatu keluarga atau rumah tangga masuk ke dalam kelompok keluarga sejahtera, keluarga miskin material, keluarga miskin spiritual, maupun keluarga miskin absolut.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan material, maka cara menghitung standar garis kemiskinan material, atau yang diistilahkan dengan material poverty line (MV) dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, melalui survey kebutuhan minimal yang diperlukan oleh suatu keluarga atau rumah tangga, yang didasarkan sekurang-kurangnya pada lima jenis kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kedua, dengan memodifikasi garis kemiskinan BPS, dari standar individu (per kapita) menjadi standar rumah tangga atau keluarga. Modifikasi ini diperoleh dari hasil perkalian antara garis kemiskinan per kapita per bulan versi BPS dengan rata-rata besaran ukuran rumah tangga, dimana rata-rata besaran ukuran keluarga dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan jumlah rumah tangga di wilayah yang diobservasi.

Ketiga, dengan menggunakan standar nishab, atau pendapatan minimal yang terkena kewajiban zakat. Dalam konteks Indonesia, standar nishab yang digunakan standar zakat pertanian. Yaitu, senilai lima *ausaq*, atau setara 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kemudian angka tersebut dikalikan dengan harga beras standar di tingkat petani yang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya, Inpres No 3/2012 telah menetapkan harga beras di tingkat petani sebesar Rp 6600/kg. Maka, besarnya nishab adalah Rp 3,48 juta/bulan.

Dari ketiga pendekatan di atas, maka pemilihan metode mana yang digunakan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Yang paling ideal adalah kita menggunakan pendekatan pertama. Namun jika pendekatan pertama tidak bisa dilakukan karena sejumlah keterbatasan, seperti keterbatasan anggaran, personil maupun waktu, maka menggunakan pendekatan kedua dan ketiga merupakan langkah alternatif yang dapat digunakan.

Standar pemenuhan kebutuhan dasar spiritual didasarkan pada lima variabel, yaitu pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah. Dari kelima variabel tersebut kemudian ditentukan standar garis kemiskinan spiritual atau spiritual poverty line yang disimbolkan dengan SV. Dipilihnya kelima variabel tersebut dilakukan dengan sejumlah alasan.

Pertama, dimasukkannya shalat, puasa dan zakat adalah karena ibadah-ibadah tersebut merupakan kewajiban dasar bagi setiap muslim. Ketidakmampuan melaksanakan ketiganya akan menyebabkan penurunan kualitas keimanan dan kondisi spiritualitas seseorang atau suatu rumah tangga.

Kedua, dimasukkannya lingkungan keluarga adalah karena pentingnya peran keluarga dalam membangun lingkungan yang kondusif dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Keluarga adalah al-madrasatul ula yaitu tempat pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga adalah tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan akhlak yang paling efektif, karena ia adalah unit terkecil dalam masyarakat. Daya tahan keluarga sangat memengaruhi daya tahan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Ketiga, dimasukkannya kebijakan

pemerintah karena kebijakan ini sangat memengaruhi kondusif tidaknya suasana untuk menjalankan ibadah dan memenuhi kebutuhan spiritual.

Selanjutnya, dilakukan scoring terhadap kelima variabel tersebut sehingga diperoleh nilai skor spiritual rata-rata keluarga (SS). Skala skor yang diberikan berkisar antara 1 sampai 5, dimana skor 1 mencerminkan kondisi spiritual terburuk, dan skor 5 mencerminkan kondisi spiritual terbaik. Misalnya, skor variabel shalat. Skor 5 adalah ketika setiap anggota keluarga melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan disertai dengan shalat-shalat sunnah. Skor 4 adalah melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah.

Skor 3 adalah melaksanakan shalat wajib tapi tidak rutin. Artinya, kadang-kadang meninggalkan shalat wajib dengan sengaja. Skor 2 menolak dan tidak percaya dengan konsep shalat, dan skor 1 adalah melarang orang lain shalat. Disebut miskin spiritual ketika skor shalatnya adalah 3 atau lebih rendah dari 3. Hal ini karena skor 3 mencerminkan "keberanian" seseorang untuk meninggalkan secara sengaja sebagian shalat wajib, seperti tidak shalat subuh dan isya. Tentu secara spiritual ini akan melemahkan iman dan memiskinkan jiwa. Dengan konsep ini, maka nilai SV adalah sama dengan 3.

Setelah diketahui nilai MV dan SV, maka kemudian keluarga yang diobservasi dimasukkan ke dalam kuadran CIBEST. Kuadran 1 atau kuadran sejahtera adalah ketika pendapatannya di atas nilai MV dan nilai SS-nya di atas nilai SV. Kuadran 2 (kemiskinan material) adalah ketika pendapatan lebih kecil atau sama dengan MV dan nilai SS di atas SV.

Kuadran 3 (kemiskinan spiritual) adalah ketika pendapatan di atas nilai MV dan nilai SS lebih kecil atau sama dengan nilai SV. Terakhir, kuadran 4 (kemiskinan absolut) adalah ketika pendapatan dan nilai SS lebih kecil atau sama dengan nilai MV dan SV. Setelah itu baru dihitung nilai indeks masing-masing kuadran. (Ariyani & Yasin, 2022)

2.7 Perempuan Rentan Miskin

2.7.1 Pengertian Perempuan.

Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan). (Nugroho,2008)

2.7.2 Pengertian Perempuan Rentan Miskin

Perempuan Rentan Miskin adalah seseorang perempuan yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan ciri-ciri), berusia 18- 60 tahun dan penghasilan tidak memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (A'yun & Faidati, 2021)

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, wanita Rentan Miskin memiliki kriteria diantaranya pencari nafkah bagi keluarganya, pendidikan rata-rata rendah, berpenghasilan sangat kurang, jika dihitung dari segi penghasilan, di dapat dengan cara mengetahui angka garis kemiskinan di bagi 30 hari, agar dapat terbebas dari penyandang maka harus memiliki pendapatan di atas angka Rp.14.175.

2.8 Kerangka Konseptual

Kesejahteraan sosial Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan guncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. sebagai suatu kondisi dapat diwujudkan melalui peranan *Non Government Organisation* sebagai salah satu sumber kesejahteraan sosial dan zakat sebagai kegiatan filantropi keagamaan. Pekerjaan sosial sebagai profesionalitas dalam kesejahteraan sosial memiliki metode intervensi pemberdayaan dan output berupa keberfungsian sosial.

Gambar 2.8 Kerangka konseptual

